

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Solihin, Abdul Wahab. 2004. *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi* (Jakarta : Rineka Cipta).
- Bagir Manan. 1995. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang- undangan Tingkat Daerah*. Pusat Penerbitan LPPM Universitas Bandung.
- Budi Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta : Media Pressindo).
- Departemen Agama RI *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro). QS. Ar-Rad ayat 11.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *KBBI Pusat Bahasa, Edisi Keempat*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).
- Dr. Hermanu Iriawan, S.E., M.Si. 2004. *Teori Kebijakan Publik*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- E Mulyasa. 2015. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. (Bandung: Remaja Rosda Karya).
- Guntur Setiawan. 2004. *Impelemiasi dalam Birokrasi Pembangunan*. (Jakarta: Balai Pustaka).
- Indrati, Maria Farida. 2021. *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kuntana Magnar. 1984. *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Administratif*. Bandung. Armico.
- Miftachul Huda. 2009. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

- Moleong, L.J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo).
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications Inc.
- Prof. Dr. Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Penerbit : Alfabeta, Bandung.
- Suaib H, dkk. 2022. *Pengantar Kebijakan Publik*. Makassar: Humanities Genius.
- Sudikno Mertokusumo. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty).
- Tangdilintin, Paulus. 2000. *Masalah-Masalah Sosial (Suatu Pendekatan Analisis Sosiologis)*. (Jakarta : pusat penerbitan universitas terbuka).
- William N. Dunn. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press).

Jurnal

- Afione Ade Rosika. Mei 2019. Tinjauan Teori Perundang-Undangan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* Vol. 12 No. 1.
- Akib Haedar, Antonius Tarigan. 2008. “Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,”. *Jurnal Baca*, Volume 1, Universitas Pepabari Makassar.
- Damara, W. (2020). Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Studi: Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Tatapamong*, 2(2).

- Dhita Ayu Pradnyapasa. 2013. Sosialisasi Mengemis: Studi Deskriptif tentang Sosialisasi Mengemis di Dusun Duluran, Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, *Journal Unair* Vol.2 No.1.
- Effendy, M. I. (2020). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Berau. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 8(1).
- Eviany, E., & Sutiyo. (2023). Perlindungan Masyarakat (Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Manajemen Kebencanaan). PT. Nas Media Indonesia.
- Kansil,C.S.T.. 2008. Pemerintahan Daerah Abd. Rachman A. Latif, Tinjauan Aspek Hukum Terhadap. *Jurnal*, Vol.23 No.1
- Nugroho, E. (2017). Kemampuan Hukum Dalam Mengatasi Perkembangan Teknologi. FH Unika Atma Jaya.

Website

- Badan pusat statistik <https://kedirikab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTYjMg==/angka-kemiskinan-di-provinsi-jawa-timur.html> diakses pada 9 november 2024 pada pukul 09.10
- JDIH Kabupaten Kediri, <https://jdih.kedirikab.go.id/rule/peraturan-daerah?tahun=2017&nomor=&judul=&skpd=pilih>
- Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Tulungrejo,_Pare,_Kediri diakses pada 24 february 2025 pukul 10.15

Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Wawancara

wawancara dengan Bapak Yusuf, S.H. selaku Kepala Pengawasan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri, pada 5 Februari 2025

wawancara dengan Bapak Joko selaku Kepala pada bidang Pelayanan sosial, pada 22 Januari 2025

wawancara dengan Bapak Marhendi selaku Kepala Bidang Ketertiban Sosial, pada 5 Februari 2025

wawancara dengan Bapak Nur Khasa. selaku Kepala Desa Tulungrejo, pada 15 Februari 2025

wawancara dengan Bapak Tri Yuliono, pada 6 Februari 2025

wawancara dengan Ibu Ninik, pada 6 Februari 2025

wawancara dengan Ibu Panca selaku kepala bidang rehabilitasi sosial, pada 22 Januari 2025

wawancara dengan Ibu Zumrotul pada 6 Februari 2025 Wawancara dengan Mas Farhan, pada 15 Februari 2025